



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Berita Sulut.co.id (Media Online)

Jumat, 4 Juli 2025

Ini Catatan Kritis Banggar DPRD Sulut kepada Pemerintahan YSK-VM



Manado, BERITASULUT.CO.ID – DPRD Sulut menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Kamis (3/7/2025). Anggota Badan Anggaran (Banggar) Jeane Lalujan SE dipercaya sebagai juru bicara Banggar untuk menyampaikan catatan kritis kepada Pemerintah Provinsi Sulut. Ada 14 catatan kritis yang disampaikan langsung kepada Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Wagub Victor Mailangkay (VM) untuk menjadi masukan dan koreksi kedepan dalam pemerintah Sulut yang lebih baik.

Pertama, Banggar memberikan apresiasi yang besar atas capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-11 yang diraih pemerintah provinsi sulawesi utara dari BPK RI terhadap LKPD tahun anggaran 2024, sebagai wujud tata kelola keuangan yang akuntabel. Kedua, pemerintah provinsi diharapkan untuk menindaklanjuti secara optimal seluruh rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan BPK, baik bersifat finansial maupun non-finansial secara sistematis dan berkelanjutan, guna menjaga serta meningkatkan kualitas laporan keuangan pada periode pelaporan berikutnya. Ketiga, penyusunan program ke depan diharapkan berbasis hasil (outcome-based budgeting) dan menjamin bahwa anggaran yang dialokasikan berdampak nyata dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat. Keempat, menekankan terkait urgensi pengalihan anggaran sebesar RP.62,23 miliar yang belum terserap untuk dialokasikan pada program-program prioritas dan mendesak, khususnya yang



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat pada berbagai sektor strategis pembangunan Kelima, seluruh perangkat daerah diharapkan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan administrasi dan keuangan secara tertib dan efisien, guna mendukung capaian visi-misi pembangunan daerah. Keenam, Pemerintah provinsi melakukan pemerataan alokasi anggaran antar perangkat daerah, menghindari ketimpangan, serta menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Ketujuh, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), perlu untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak, khususnya PKB melalui intensifikasi razia kendaraan bermotor, serta memastikan ketersediaan blanko bpkb dan stnk guna mendukung penerimaan bbnkb.

Selain itu, perbaikan data kependudukan juga diperlukan agar penerimaan pajak rokok dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Kedelapan, DPRD mencermati masih adanya potensi PAD yang belum tergarap optimal, seperti dari denda proyek, retribusi daerah, dan pajak air permukaan. potensi ini harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara teknis dan terukur. Kesembilan, Penetapan target PAD ke depan dalam apbd harus disesuaikan dengan kondisi objektif dan analisis yang komprehensif untuk menghindari proyeksi yang terlalu optimistis. Kesepuluh, Pemerintah provinsi diharapkan mempercepat proses pembebasan lahan yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur strategis, terutama pada kawasan kek dan proyek prioritas lainnya. Kesebelas, menjamin keterpaduan dan konsisten antara dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu rpjmd, rkp, dan pokok-pokok pikiran (pokir) dprd, guna memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan. Keduabelas, Aspirasi masyarakat yang telah terakomodasi dalam pokir dprd dan telah memperoleh kesepakatan bersama, tidak dapat dilakukan perubahan secara sepihak dalam apbd perubahan tanpa melalui mekanisme persetujuan DPRD. Ketigabelas, Perlu dijaga keseimbangan antara program dan kegiatan yang dianggarkan dengan manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Keempatbelas, Memberikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi provinsi sulawesi utara yang berada di atas rata-rata nasional serta penurunan tingkat kemiskinan, namun menekankan perlunya perhatian dan langkah strategis yang lebih optimal dalam mengatasi tingkat pengangguran yang masih tergolong tinggi.

Selain itu, Luluhan pun menyampaikan catatan sebagai pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Sulut yang disampaikan dalam akhir pembahasan Banggar dan TAPD terhadap ranperda provinsi Sulut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024. Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Sulut YSK terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 mengatakan, sebagai pemenuhan tanggungjawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang telah dilaksanakan selang Tahun Anggaran 2024. Maka sejak diajukannya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan segala keterbatasan dan hambatan yang ada, kami telah berkomitmen dan terus berupaya maksimal menghadirkan dokumen pertanggungjawaban yang paripurna. "Namun saya menyadari bahwa dalam proses pembahasan masih terdapat berbagai kekurangan, yang kemudian mampu direspon secara bijak, cerdas dan tepat sasaran oleh segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Respon yang Saya maksudkan antara lain melalui berbagai



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

rekomendasi, saran dan kritik yang membangun selama tahapan pembahasan maupun melalui tanggapan-tanggapan yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu sehingga Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 dapat disempurnakan, serta dapat diterima oleh rakyat Sulawesi Utara melalui para wakilnya di DPRD,” ujarnya. Untuk itu, atas nama Pemerintah dan rakyat Sulawesi Utara tak henti-hentinya ia pun menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang dengan penuh semangat dan komitmen tinggi, serta tidak kenal lelah melakukan pembahasan dan pengkajian secara kritis, cermat, teliti, obyektif dan komprehensif terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024. Diketahui, Ranperda ini akhirnya disetujui dan ditetapkan sebagai perda melalui penandatanganan bersama. (IKA)